

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi pasti membutuhkan sebuah sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitasnya agar berjalan dengan optimal. Sarana dan prasarana menjadi bagian yang penting dalam sebuah organisasi. Salah satu unsur dalam sarana dan prasarana ini dapat berupa BMN. (Pemerintah RI, 2014) menyatakan bahwa “BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. BMN ini terdiri dari beberapa jenis diantaranya ialah persediaan (contohnya persediaan alat tulis kantor), aset tetap (seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan), aset tetap lainnya (misalnya: buku-buku perpustakaan, hewan peliharaan, barang yang memiliki nilai kesenian), konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya yang mencakup aset kemitraan (seperti Bangun Serah Guna dan KSP), aset tak berwujud (seperti Hak Cipta) dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya.

BMN merupakan salah satu unsur yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional suatu organisasi ataupun instansi pemerintah. BMN tentunya memiliki masa manfaat tertentu yang cenderung terbatas, oleh karena itu BMN

harus dikelola dengan baik agar BMN dapat memiliki masa manfaat yang tidak kurang dari seharusnya dan dapat sesuai dengan masa manfaat yang telah diperhitungkan.

(Pemerintah RI, 2014) menjelaskan bahwa “Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Dari penjabaran pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatas, Pengamanan dan pemeliharaan merupakan hal yang penting dan cukup menjadi sorotan. Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah dibagi menjadi beberapa jenis meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud berpedoman pada daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKP).

(Amiri, 2016) mengatakan bahwa “Permasalahan klasik yang sering timbul di lapangan seperti manajemen sumber daya manusia, ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset dan penatausahaan BMN yang belum maksimal dapat dilihat pada opini badan pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (*disclaimer*) hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan BMN”.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN cenderung kurang menjadi perhatian sehingga kesalahan sering terjadi dan menimbulkan persoalan. Diperkuat oleh (KPK RI, 2020) bahwa permasalahan

utama dalam pengelolaan aset ini adalah pencatatannya, “barangnya ada tapi catatannya tidak ada, dan juga tidak ada barangnya, tapi masih ada pemeliharannya”.

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh beberapa kantor pemerintah kurang maksimal sehingga sebuah pertanyaan apakah semua kantor pemerintah juga kurang dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan?. Kurangnya dalam melakukan pengamanan dan pemeliharaan dapat berupa barang persediaan yang hilang, rusak, dan terbengkalai. Kejadian tersebut dapat disebabkan oleh *Human error* atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia, dan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi vertikal milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat eselon 1 Direktur Jendral Perbendaharaan Bapak Hadiyanto. Dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada Direktur Jendral Perbendaharaan tentunya memiliki sarana dan prasarana yang cukup baik sebagai penunjang kinerja agar hasil yang dapat diberikan dapat optimal. Berdasarkan permasalahan topik pembahasan di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir yang bertopik pengamanan dan pemeliharaan BMN dengan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan yang dapat menjadi penunjang kinerja. Penulis juga akan melakukan tinjauan atas masalah apa yang dapat ditimbulkan ketika pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan

dilakukan. Tinjauan yang akan dilakukan sebagai dasar Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini yang berfokus pada berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN dalam Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah?
2. Masalah apa saja yang dapat timbul dari pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana solusi yang efektif dalam menghadapi masalah yang timbul dari pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini ialah:

1. Untuk mengetahui seperti apa kegiatan pengamanan dan pemeliharaan BMN dalam Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa tengah.
2. Untuk mengetahui masalah seperti apa yang dapat timbul dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang efektif dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebatas bagaimana pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2021. Pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan berdasar pada data yang diperoleh dari objek penelitian. Peninjauan dilakukan terhadap pengamanan meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Sementara untuk pemeliharaan ditinjau berdasarkan pada bentuk, dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat kepada berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat yang dapat diberikan ialah:

1. Memberikan sebuah pemahaman dan menambah wawasan tentang salah satu siklus di dalam BMN yaitu proses pengamanan dan pemeliharaan di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan BMN yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
3. Hasil dari penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi penulis untuk membuat sebuah Karya Tulis yang masih berhubungan dengan topik yang diambil.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang yang melandasi penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pemaparan penulis tentang teori-teori yang menjadi dasar atas pembahasan yang ada dalam karya tulis yaitu pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN. dalam bab ini menerangkan pengertian dari BMN, dasar hukum yang melandasi pengamanan dan pemeliharaan BMN, pengelolaan BMN dan tata cara pengamanan dan pemeliharaan BMN.

BAB III METODEDE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum terkait metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir, gambaran umum dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah seperti sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, motto, janji layanan dan maklumat dan struktur organisasi. Kemudian penulis juga melakukan peninjauan atas pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini berisikan simpulan atas hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Simpulan ini merupakan garis besar dari pembahasan sebelumnya. Simpulan mencakup tinjauan atas pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMN pada Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah,

permasalahan atas pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan dan solusi atas permasalahan tersebut.